|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **logo aset** | Published every June and December  **JURNAL ASET (AKUNTANSI RISET)**  ISSN:2541-0342 (Online). ISSN:2086-2563 (Print). http://ejournal.upi.edu/index.php/aset | Image result for logo upi |
| **Pengaruh Koneksi Politik dan *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak**  **Poppy Ariyani Sumitha Lestari1, Dudi Pratomo2, Ardan Gani Asalam3**  Program Studi Akuntansi, Universitas Telkom, Bandung, Indonesia | | |
| **Abstract.** *This study attempts to examine the association between political connection, capital intensity, and tax aggressiveness of mining companies that listed on Indonesia Stock Exchange for the years 2013 to 2017. Besides that, this study attempts to analyze the simultaneous and partial association between political connection and capital intensity on tax aggressiveness of mining companies that listed in Indonesia Stock Exchange for the years 2013-2017. The analytical method that used in this study are statistic descriptive and panel data regression analysis by using E-views 10. The sample selection technique used was purposive sampling and obtained 13 mining companies for the years 2013 to 2017 that results in 65 samples. We find that there is simultaneously influence between Political Connections and Capital Intensity on Tax Aggressiveness. This study also finds that Political Connections have no impact on Tax Aggressiveness, while Capital Intensity has a negative impact on Tax Aggressiveness.*  **Keywords:***Capital Intensity*, *Political Connections*, *Tax Aggressiveness*  **Abstrak.** *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koneksi politik, capital intensity dan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Selain itu juga untuk menganalisis pengaruh secara simultan dan parsial antara koneksi politik dan capital intensity terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017. Metode analisis yang digunakan adalah pengujian statistik deskriptif dan analisis regresi data panel dengan menggunakan software E-views versi 10. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu purposive sampling dan diperoleh 13 perusahaan sektor pertambangan dengan periode penelitian selama lima tahun yaitu tahun 2013-2017 sehingga didapat 65 unit sampel dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Koneksi Politik dan Capital Intensity berpengaruh terhadap Agesivitas Pajak. Secara parsial Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak, sedangkan Capital Intensity berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.*  **Kata Kunci:** *Agresivitas Pajak, Capital Intensity, Koneksi Politik* | | |
|  | | |
| ***Corresponding author.*** [poppyaryn@gmail.com](mailto:poppyaryn@gmail.com), [dudipratomo@telkomuniversity.ac.id](mailto:dudipratomo@telkomuniversity.ac.id), ganigani@telkomuniversity.ac.id  ***How to cite this article.*** Lestari. Pratomo. Asalam. (2019). Pengaruh Koneksi Politik dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset). Program Studi Akuntansi. Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia*,  ***History of article.*** | | |

*.*

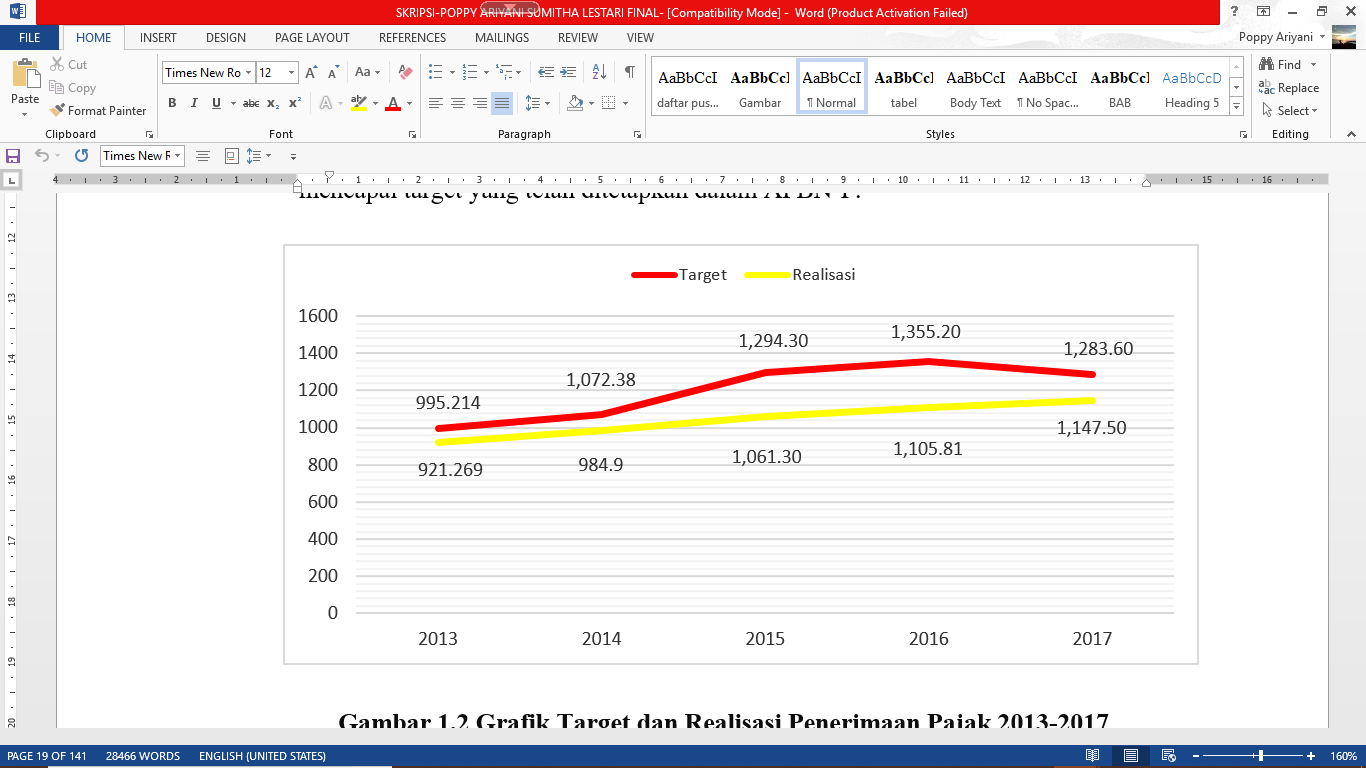
### PENDAHULUAN

Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kontribusi pajak bagi Negara sangat diperlukan untuk pengembangan dan pembangunan di suatu Negara dan kemakmuran rakyat, khususnya di Indonesia yang masih merupakan Negara berkembang.

Meskipun kontribusi pajak untuk penerimaan negara merupakan yang terbesar, realisasi penerimaan pajak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 masih dibawah target yang ditetapkan dalam APBN-P. Perbandingan realisasi penerimaan pajak dan target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam APBN-P ditunjukkan oleh Gambar 1, di mana pada tahun 2013, total realisasi penerimaan pajak sebesar Rp921,269 triliun atau mencapai 92,57% dari target APBN-P 2013 sebesar Rp995,214 triliun. Sedangkan pada tahun 2014 realisasi penerimaan pajaknya adalah sebesar Rp984,90 triliun dari target sesuai APBN-P sebesar Rp 1.072,38 triliun atau mencapai 91,84% dari target. Pada tahun 2015 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 1.061,3 triliun atau 82% dari target tahun 2015 yaitu Rp 1.294,3 triliun.

Realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105,81 triliun atau 81.60% dari target tahun APBN-P 2016 sebesar Rp 1.355,20 triliun. Penerimaan pajak di tahun 2017 mencapai Rp 1.147,5 triliun atau 89,4% dari target APBN-P 2017 sebesar Rp1.283,6 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBN-P.

Dalam mengukur kinerja penerimaan pajak, *tax ratio* merupakan salah satu indikator yang dapat menilai hal tersebut. *Tax ratio* merupakan perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap Produk Domestik



Sumber: Laporan Kinerja Kementrian Keuangan 2013-2017, (2019)

Gambar 1. Grafik Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2013-2017 (Triliun Rupiah)

Bruto (PDB). Rasio ini menyatakan jumlah pajak yang dikumpulkan pada suatu masa berbanding dengan pendapatan nasional atau PDB di masa yang sama (nusantara.news, 2018).

Ekonomi Faisal Basri berpendapat *tax ratio* selama 5 tahun terakhir menurun. Berdasarkan catatannya, *tax ratio* di 2012 sebesar 11,4%, 2013 sebesar 11,3%, 2014 sebesar 10,9%, 2015 sebesar 10,8%, 2016 sebesar 10,4%, dan 2017 diestimasikannya sebesar 10,1%. Dalam perhitungan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara, realisasi *tax ratio* pada 2017 diperkirakan jauh lebih buruk, berkisar 8,6% hingga 8,8% (nusantara.news, 2018).

Namun, Laporan Kinerja Kementrian Keuangan di tahun 2017 menunjukkan rasio pajak di tahun ini adalah sebesar 9,95%. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam APBN-P dan t*ax ratio* Indonesia yang menurun dari tahun ke tahun menunjukkan adanya keagresivitasan wajib pajak terhadap pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank *et al.* (2009) adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Khurana dan Moser (2009) juga mendefinisikan agresivitas pajak sebagai *tax planning* perusahaan melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance* atau *tax sheltering*).

Menurut Gemilang (2017), perusahaan yang agresif terhadap pajak dipandang memiliki manfaat bagi perusahaan. Salah satunya dapat menghemat pembayaran terhadap pajak yang akan membuat laba semakin besar untuk mendanai investasi perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan di masa yang akan datang. Namun, terdapat pula kerugian jika perusahaan tersebut agresif terhadap pajak. Yaitu, kemungkinan perusahaan mendapat sanksi dari kantor pajak berupa denda, serta turunnya harga saham perusahaan akibat pemegang saham lainnya mengetahui tindakan agresivitas pajak perusahaan. Bagi pemerintah, tindakan agresivitas pajak perusahaan ini akan mengurangi pendapatan Negara dalam sektor pajak.

Usaha untuk meminimalkan beban pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan dilakukan oleh beberapa perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan di Indonesia. Pada tahun 2013, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengungkapkan, sekitar 60 persen perusahaan tambang di Indonesia tak membayar pajak dan royalti kepada negara. Menurut Abraham, banyaknya perusahaan tambang yang mangkir dari kewajibannya membayar pajak karena adanya kesepakatan ilegal dengan aparat dan pejabat di daerah (nasional.kompas.com, 2013).

Pada tahun 2014, Direktorat Jenderal Pajak mengincar pengusaha tambang yang mangkir membayar kewajiban pajak. Sektor ini dinilai memiliki potensi penerimaan pajak besar namun tak maksimal. Suhardi Alius selaku Kepala Bareskrim Polri mengungkapkan, dari data yang dimiliki pihak kepolisian, saat ini terdapat sekitar 11.000 pemegang izin tambang di Indonesia. Sementara, pengusaha yang mangkir membayar pajak mencapai sekitar 9.000 wajib pajak (merdeka.com, 2014).

Dikutip dari cnnindonesia.com (2017), kontribusi sektor mineral dan batu bara pada penerimaan pajak juga menunjukkan tren penurunan sepanjang 2012-2016, yakni dari 5 persen mencapai 2 persen. Dari Rp28 triliun pada 2012 menjadi hanya Rp16 triliun pada 2016. Rasio Pajak di sektor pertambangan minerba pun menunjukkan penurunan sepanjang 2011-2016, yakni 12 persen hingga 3,88 persen.

Maraknya usaha untuk mengecilkan beban pajak dalam perusahaan yang bergerak dalam sektor pertambangan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah dalam proses pelaksanaan pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal pajak (DJP) berusaha untuk terus menaikkan penerimaan negara dari penerimaan pajak, sedangkan wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin.

Terdapat beberapa faktor yang diduga mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak dalam suatu perusahaan, di antaranya adalah koneksi politik dan *capital intensity*. Perusahaan berkoneksi politik ialah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Purwoto, 2011). Perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis (Leuz dan Gee, 2006).

Penelitian mengenai pengaruh koneksi politik dan agresivitas pajak telah dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi politik lebih agresif terhadap pajak dikarenakan dengan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif dan kecenderungan untuk mengambil keputusan dengan risiko yang lebih tinggi.

Faktor yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak selain koneksi politik adalah intensitas modal (*capital intensity*). Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (modal) (Novitasari, 2016). *Capital intensity* yang merupakan investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapatkan laba. Investasi perusahaan pada aset tetap akan menyebabkan adanya beban depresiasi dari aset tetap yang diinvestasikan. Besarnya beban depresiasi untuk aset tetap diperaturan perpajakan Indonesia beraneka ragam tergantung dari klasifikasi aset tetap tersebut (Andhari dan Sukartha, 2017).

Penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih berinvestasi pada aset sehingga timbul beban depresiasi yang tinggi, dan dari beban tersebut akan mengurangi laba perusahaan sehingga dapat berpengaruh kewajiban perpajakan perusahaan.

**KAJIAN LITERATUR**

**Agresivitas Pajak**

Pada praktik bisnis, umumnya perusahaan mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba (Suandy, 2011:5). Hal ini yang menyebabkan perusahaan menjadi lebih agresif terhadap pajak.

Menurut Frank et al. (2009), agresivitas pajak merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak melalui perencanaan pajak serta menggunakan metode yang diklasifikasikan atau tidak diklasifikasikan sebagai tax evasion. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan menyalahi aturan, banyak metode-metode yang digunakan oleh perusahaan yang membuat perusahaan diasumsikan lebih agresif terhadap pajak. Hal ini juga diungkapkan oleh Richardson et al., (2013) bahwa agresivitas pajak meliputi kegiatan meliputi kegiatan perencanaan pajak yang legal atau yang mungkin jatuh ke wilayah abu-abu, serta kegiatan yang ilegal.

**Koneksi Politik**

Koneksi politik merupakan suatu kondisi di mana terjalin suatu hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam politik yang digunakan untuk mencapai suatu hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (Purwanti dan Sugiyarti, 2017). Perusahaan yang memiliki koneksi politik akan mendapat perlindungan dari pemerintah dan memiliki resiko pemeriksaaan pajak yang rendah sehingga membuat perusahaan makin agresif melakukan *tax planning* yang berakibat pada keburaman transparansi keuangan (Butje dan Tjondro, 2014).

Hal ini yang menyebabkan perusahaan dengan koneksi politik akan lebih berani melakukan upaya minimalisasi pajaknya karena resiko untuk diperiksa akan lebih rendah bahkan tidak akan mengalami pemeriksaan oleh badan pemeriksa pajak (Lestari dan Putri, 2017). Faccio (2007) juga mengemukakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik membayar pajak lebih rendah.

***Capital Intensity***

*Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). Rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya untuk menghasilkan penjualan (Ardyansah, 2014).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Menurut Hanum (2013), semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula beban depresiasinya sehingga mengakibatkan laba sebelum pajak berkurang. Hal ini akan mengakibatkan penghasilan kena pajak menjadi lebih kecil atau berkurang.

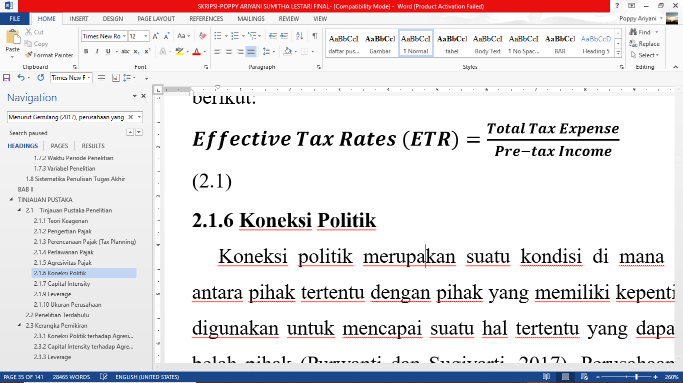
***Leverage***

Rasio *leverage* atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Hal ini juga dapat diartikan seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, rasio *leverage* atau rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahannya dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2016:114).

**Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria penting yang harus dimiliki perusahaan. Semakin besar perusahaan, semakin besar kesan baik yang harus diciptakan untuk menarik perhatian masyarakat (Pradnyadari, 2015).

Menurut Pratiwi dan Rahayu (2015), ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan besar kecilnya perusahaan di antaranya adalah total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Kurniasari (2015) menyatakan bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.



**HIPOTESIS PENELITIAN**

Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Koneksi Politik dan *Capital Intensity* berpengaruh secara simultan secara signifikan terhadap agresivitas pajak
2. Koneksi politik berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan
3. *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak

**METODOLOGI PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yaitu: (1) Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI, (2) Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang secara konsisten listing selama tahun 2013 sampai dengan 2017, (3) Perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan secara konsisten dari tahun 2013-2017 yang telah diaudit, (4) Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 yang mengalami keuntungan atau tidak memiliki laba komersial negatif (Richardson dan Lanis, 2012). Maka dari itu, diperoleh 65 sampel penelitian.

**Variabel Dependen**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Agresivitas Pajak yang diproksikan melalui *Effective Tax Rate* (ETR). ETR yang tinggi menunjukkan tingkat keagresivitasan perusahaan yang rendah. Sedangkan ETR yang rendah menunjukkan adanya keagresivitasan perusahaan terhadap pajak. Semakin ETR mendekati angka nol (0), maka beban pajak perusahaan tersebut semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya tindakan pajak agresif dalam perusahaan (Muzakki dan Darsono, 2015). Menurut Dyreng *et al*. (2017), *Effective Tax Rates* (ETR) dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Variabel Independen**

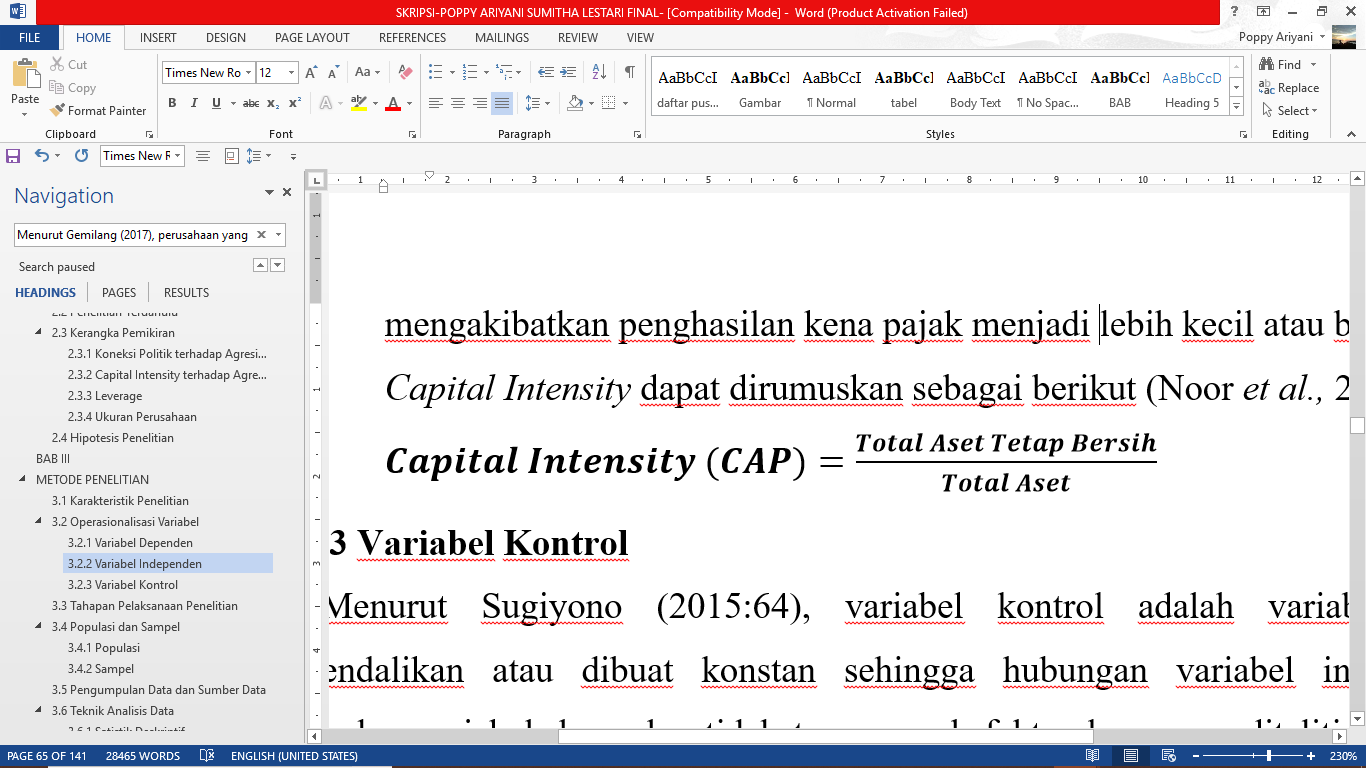
1. **Koneksi Politik**

Purwoto (2011) mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politis adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik dan mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah.

Menurut Adhikari et al. (2006), Faccio (2007), Sudibyo dan Jianfu (2015) dalam Ferdiawan dan Firmansyah (2017), koneksi politik dapat diukur menggunakan variabel *dummy*. Diberi kode 1 (satu) jika suatu perusahaan mempunyai koneksi politik dan 0 (nol) jika sebaliknya. Perusahaan dikatakan memiliki koneksi politik memiliki kriteria sebagai berikut:

* 1. Salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik.
  2. Salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer.
  3. Salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat.

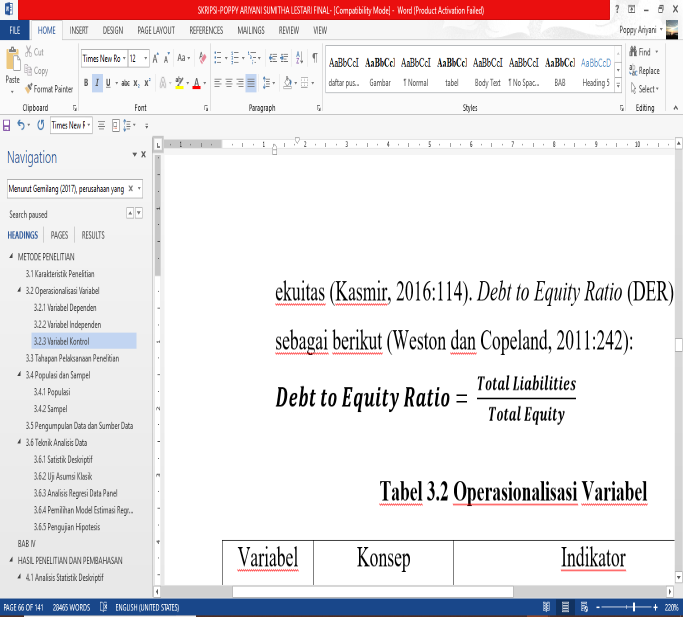
1. ***Capital Intensity***

*Capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (intensitas modal). (Ardyansah, 2014). *Capital Intensity* dapat dirumuskan sebagai berikut (Noor *et al.,* 2010):

**Variabel Kontrol**

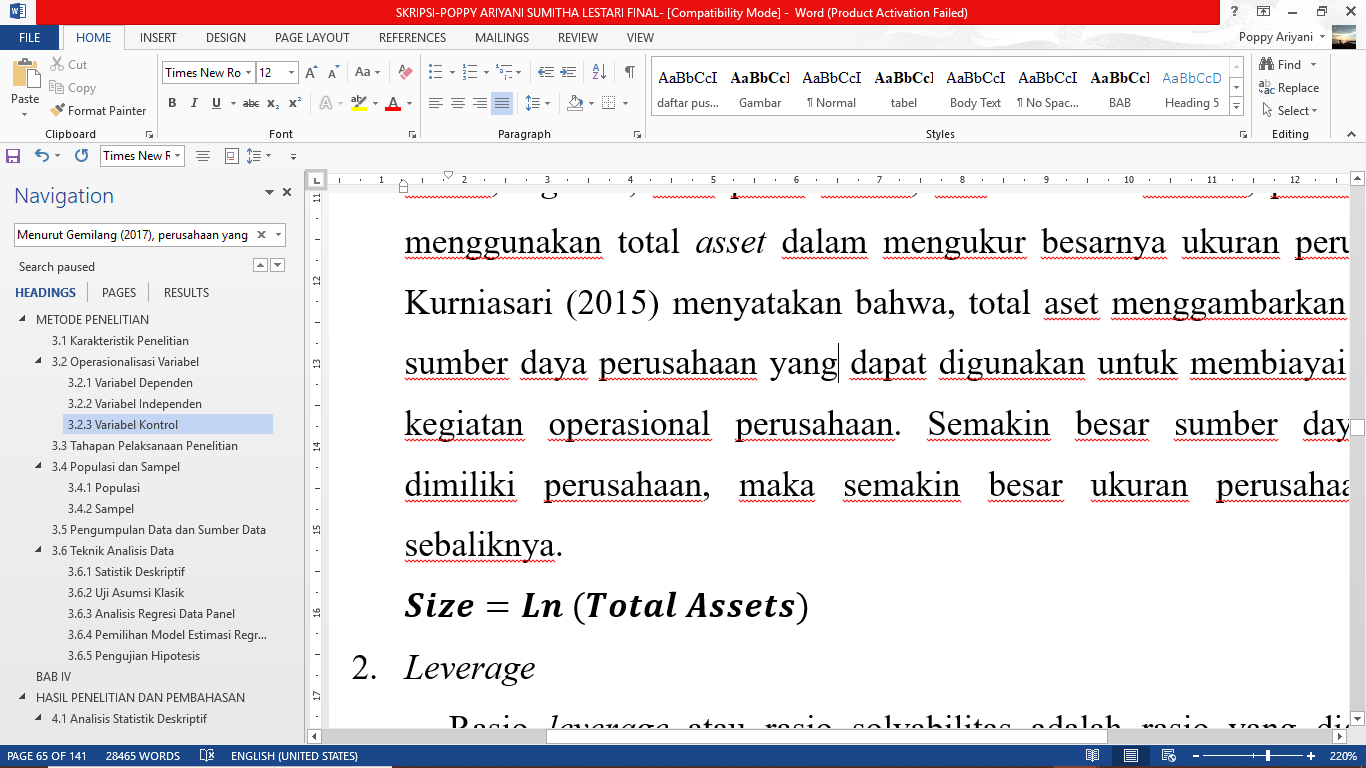
1. ***Leverage***

Rasio leverage atau rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir, 2016:114). Penelitian ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk memproksikan *leverage. Debt to Equity Ratio* (DER) dapat dirumuskan sebagai berikut (Weston dan Copeland, 2011:242):



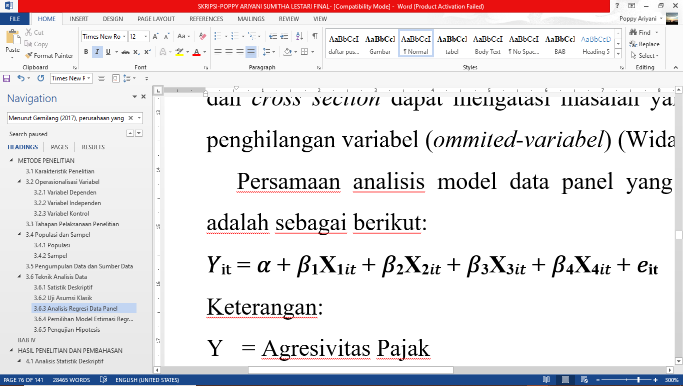
1. **Ukuran Perusahaan**

Kurniasari (2015) menyatakan bahwa, total aset menggambarkan seluruh sumber daya perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan operasional perusahaan. Semakin besar sumber daya yang dimiliki perusahaan, maka semakin besar ukuran perusahaan, dan sebaliknya.



**Metode Penelitian**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel yang memiliki persamaan sebagai berikut:



Keterangan:

Y = Agresivitas Pajak

α = Konstanta

X1 = Koneksi Politik

X2 = *Capital Intensity*

X3 = *Leverage*

X4 = Ukuran Perusahaan

β1,β2,β3,β4 = Koefisien regresi

e = *Error Time*

t = Waktu

i = Perusahaan

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Statistik Deskriptif**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan tahunan dan laporan keuangan dari 13 perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2013-2017 yang memenuhi kriteria pengambilan sampel sehingga terdapat 65 data observasi untuk 5 periode penelitian. Hasil perhitungan dan pengujian statistik deskriptif tersaji dalam tabel 1 berikut ini:

|  |
| --- |
| Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Variabel | N | *Mean* | Maksimum | Minimum | Std. Dev |
| ETR | 65 | 0,336095 | 0,748647 | 0,219804 | 0,103543 |
| KOPOL | 65 | 0,815385 | 1 | 0 | 0,391005 |
| CAP | 65 | 0,272950 | 0,494350 | 0,093748 | 0,101233 |
| DER | 65 | 0,926887 | 3,879543 | 0,132126 | 0,811281 |
| SIZE | 65 | 29,12253 | 32,15371 | 26,51310 | 1,341622 |

Sumber: Data yang Telah Diolah E-Views(2019)

**Analisis Regresi Data Panel**

Berdasarkan hasil pengujian model regresi data panel yang dilakukan yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan dalam penelitian ini adalah model *common effect*. Hasil uji menggunakan model *common effect* dengan software E-Views versi 10 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Dependent Variable: ETR | | |  |  | | Method: Panel EGLS (Cross-section weights) | | | |  | | Date: 02/06/19 Time: 18:33 | | |  |  | | Sample: 2013 2017 | | |  |  | | Periods included: 5 | | |  |  | | Cross-sections included: 13 | | |  |  | | Total panel (balanced) observations: 65 | | | |  | | Linear estimation after one-step weighting matrix | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | C | 0.603198 | 0.237426 | 2.540579 | 0.0137 | | KONEKSI\_POLITIK | 0.006286 | 0.018007 | 0.349112 | 0.7282 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | CAPITAL\_INTENSITY | -0.240416 | 0.065884 | -3.649054 | 0.0006 | | DER | 0.054857 | 0.011091 | 4.946052 | 0.0000 | | SIZE | -0.009296 | 0.008011 | -1.160394 | 0.2505 |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Weighted Statistics | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | R-squared | 0.448888 | Mean dependent var | | 0.437054 | | Adjusted R-squared | 0.412147 | S.D. dependent var | | 0.204513 | | S.E. of regression | 0.081675 | Sum squared resid | | 0.400253 | | F-statistic | 12.21771 | Durbin-Watson stat | | 1.431591 | | Prob(F-statistic) | 0.000000 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |  | Unweighted Statistics | |  |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | R-squared | 0.317129 | Mean dependent var | | 0.336095 | | Sum squared resid | 0.468557 | Durbin-Watson stat | | 1.428655 | |  |  |  |  |  |   Tabel 2. Hasil Uji Model *Common Effect* |

Sumber: Output E-Views (2019)

Berdasarkan *output* E-Views pada tabel 2 persamaan regresi data panel dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

**𝑌 = 0,603198 + 0,006286𝑋1 – 0,240416𝑋2 + 0,054857𝑋3 – 0,009296𝑋4 + 𝑒**

Keterangan:

𝑌 = Agresivitas Pajak

𝑋1 = Koneksi Politik

𝑋2 = *Capital Intensity*

𝑋3 = *Leverage*

𝑋4 = Ukuran Perusahaan

𝑒 = Kesalahan Residuan (*error*)

Persamaan regresi data panel dapat diartikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,603198 menunjukkan bahwa apabila variabel independen pada regresi yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada perusahaan sektor pertambangan yaitu sebesar 0,603198 satuan.
2. Koefisien regresi Koneksi Politik (𝑋1) sebesar 0,006286 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Koneksi Politik sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,006286 satuan.
3. Koefisien regresi *Capital Intensity* (𝑋2) sebesar – 0,240416 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan *Capital Intensity* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami penurunan sebesar 0,240416 satuan.
4. Koefisien regresi *Leverage* (𝑋3) sebesar 0,054857 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan *Leverage* sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami kenaikan sebesar 0,054857 satuan.
5. Koefisien regresi Ukuran Perusahaan (𝑋4) sebesar –0,009296 menunjukkan bahwa setiap terjadi peningkatan Ukuran Perusahaan sebesar satu satuan dengan asumsi variabel lain bernilai 1, maka Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor Pertambangan akan mengalami penurunan sebesar 0,009296 satuan.

**Koefisien Determinasi (R2)**

Berdasarkan *output* E-Views pada tabel 2 diperoleh nilai *Adjusted R-square* sebesar 0,412147 atau 41,12% yang berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri atas Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan dapat menjelaskan variabel dependen yaitu agresivitas pajak perusahaan sebesar 41,12% sedangkan sisanya sebesar 58,88% dapat dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

**Hasil Pengujian Simultan**

Jika F-statisik ˃ 0,05 maka H0 diterima, artinya variabel Koneksi Politik, *Capital Intensity*, Leverage, dan Ukuran Perusahaan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan jika F-statistik ˂ 0,05 maka H0 ditolak, artinya variabel Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan *output* E-Views pada tabel 2 diperoleh hasil nilai probabilitas (F-*statistic*) dalam penelitian ini sebesar 0,000000, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menolak H0 dan menerima H1 yang berarti bahwa seluruh variabel independen yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity*, *Leverage,* dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak.

**Hasil Pengujian Parsial**

Pengujian ini menggunakan taraf signifikansi sebagai berikut:

1. Jika probabilitas ˂ 0,05 maka H0 ditolak, terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas ˃ 0,05 maka H0 diterima, tidak terdapat pengaruh antara variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

Berdasarkan *output* E-Views tabel 2 dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Nilai probabilitas variabel Koneksi Politik sebesar 0,7282. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,7282 > 0,05 dengan koefisien regresi bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
2. Nilai probabilitas variabel *Capital Intensity* sebesar 0,0006. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,006 < 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga variabel independen *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.
3. Nilai probabilitas variabel *Leverage* sebesar 0,0000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,0000 < 0,05 dengan koefisien regresi bernilai negatif, dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima sehingga variabel kontrol *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak.
4. Nilai probabilitas variabel Ukuran Perusahaan sebesar 0,2505. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 0,2505 > 0,05 dengan koefisien regresi bernilai positif, dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak sehingga variabel kontrol Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak.

**Pengaruh Koneksi Politik terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan *output* E-Views pada tabel 2, variabel Koneksi Politik memiliki nilai probabilitas 0,7282, lebih besar dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa secara parsial variabel Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Perusahaan dengan koneksi politik tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak yang mana dapat diartikan apabila perusahaan tersebut memiliki koneksi politik, maka belum tentu akan meningkatkan keagresivitasan pajak suatu perusahaan.

Variabel Koneksi Politik memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,006286 menunjukkan arah positif yang berarti jika nilai Agresivitas Pajak meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lainnya tetap maka agresivitas pajak akan bertambah sebesar (koefisien) 0,006286 satuan. Nilai koefisien regresi variabel Koneksi Politik yang bernilai positif dapat diartikan hal ini dapat meningkatkan Agresivitas Pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa variabel memang tidak dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Perusahaan memilih untuk tidak memanfaatkan koneksi politiknya untuk meminimalkan beban perpajakannya dikarenakan hal ini akan mengarah kepada *tax evasion* atau cara-cara untuk meminimalkan beban perpajakan suatu perusahaan melalui cara yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Perusahaan ingin menjaga nama baik dan citra perusahaan mereka di mata para pemangku kepentingan seperti pemerintah, investor atau masyarakat. Jika dilihat dari pemangku kepentingan yaitu pemerintah, maka perusahaan yang tidak memanfaatkan koneksi politiknya dan patuh dalam hal membayar pajaknya maka pemerintah akan memberikan penghargaan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini akan memberikan perusahaan citra yang baik kepada *stakeholders* perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 2, variabel Koneksi Politik memiliki nilai *mean* sebesar 0,81539. Berdasarkkan tabel 2 dari data sampel yang menunjukkan bahwa sebanyak 12 sampel dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 memiliki variabel Koneksi Politik di bawah nilai *mean*. Hal tersebut berarti menunjukkan bahwa variabel yang kecil atau 12 perusahaan yang memiliki koneksi tidak dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kim dan Zhang (2016) dan hipotesis yang dikembangkan oleh penulis yang menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Putri (2017), yang menemukan bahwa variabel Koneksi Politik tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

**Pengaruh *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak**

Berdasarkan *output* E-Views pada tabel 2, variabel *Capital Intensity* memiliki nilai probabilitas 0,0006, yang mana nilai ini lebih rendah dari taraf signifikansi yaitu 0,05 sehingga dapat diambil keputusan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak yang berarti bahwa secara parsial variabel *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak. Hal tersebut berarti bahwa perusahan dengan *Capital Intensity* yang dapat memperendah keagresivitasan pajak pada perusahaan sektor sektor pertambangan tahun 2013-2017.

Variabel *Capital Intensity* memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,240416 menunjukkan arah negatif yang berarti jika nilai Agresivitas Pajak meningkat sebesar 1 satuan dan variabel lainnya tetap maka agresivitas pajak akan berkurang sebesar 0,240416 satuan. Nilai koefisien regresi variabel *Capital Intensity* ini bernilai negatif yang berarti dapat menurunkan Agresivitas Pajak. Hal ini dapat membuktikan bahwa variabel *Capital Intensity* dapat memperendah adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

*Capital Intensity* menunjukkan arah yang negatif. Hal ini disebabkan oleh penggunaaan proksiAgresivitas Pajak yang digunakan adalah *Effective Tax Rates* (ETR). Di mana ETR hanya dapat mengidentifikasi perbedaan tetap antara perhitungan laba buku dan laba fiskal (Frank *et al*., 2009). Sedangkan, pembebanan biaya penyusutan merupakan salah satu perbedaan temporer.

Menurut Noor *et al.* (2010), variabel *capital intensity* yang memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak karena perusahaan dengan memiliki aset tetap yang tinggi akan mempunyai penghasilan kena pajak yang rendah karena adanya perbedaan ketentuan perpajakan antara fiskal dan komersial. Dengan memiliki aset tetap, perusahaan dapat membebankan biaya penyusutan yang akan menurunkan penghasilan kena pajak di mana beban pajak perusahaan tersebut ikut menurun.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 (b) tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Namun, menurut Dharma dan Ardiana (2016) kepemilikan aset tetap oleh perusahaan digunakan perusahaan untuk tujuan operasional perusahaan bukan untuk memperkecil beban pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis deskriptif pada tabel 2 variabel memiliki nilai *mean* sebesar 0,27295, berdasarkan tabel 2 dari data sampel yang menunjukkan bahwa sebanyak 36 sampel dari perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017 memiliki variabel dibawah nilai *mean*. Hal tersebut berarti menunjukkan perusahaan dengan *Capital Intensity* yang kecil atau 36 sampel *capital intensity* yang sedikit tidak dapat mengurangi adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017.

Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andhari dan Sukartha (2017) dan hipotesis yang dikembangkan oleh penulis yang menyatakan bahwa variabel Capital Intensity berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Namun, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

**SIMPULAN DAN SARAN**

**Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh koneksi politik dan *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu terdapat 13 perusahaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sehingga diperoleh sebanyak 65 sampel penelitian. Berdasarkan pengujian hipotesis secara simultan dan parsial:

1. Seluruh variabel independen yaitu Koneksi Politik, *Capital Intensity* dengan variabel kontrol *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
2. Koneksi Politik tidak berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.
3. *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2017.

**Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan bagi penelitian selanjutnya yaitu sebagai berikut:

1. Bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi pembaca dan memberikan referensi untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang agresivitas pajak pada sektor pertambangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

1. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya dalam mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak diharapkan dapat menggunakan *Cash Effective Tax Rates* (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan CETR dapat mengidentifikasi keagresivitasan perusahaan dengan menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan temporer (Chen *et al*., 2010)

**DAFTAR PUSTAKA**

Adhikari, A., Derashid, C., & Zhang, H. (2006). Public policy, political connections, and effective tax rates: Longitudinal evidence from Malaysia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(5), 574–595.

Andhari, P. A., & Sukartha, I. M. (2017). Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Inventory Intensity, Capital Intensity dan Leverage Pada Agresivitas Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 2115-2142.

Ardyansah, D. (2014). Pengaruh Size, Leverage, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Dipenogoro Journal of Accounting, 3, No. 2*, 1-9.

Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review, 4*(2), 1-9.

Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms?. *Journal of Financial Economics*. *95*(1), 41-61.

Dharma, I. M., & Ardiana, P. A. (2016). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 15*(1), 584-613.

Faccio, M. (2007). The Characteristics of Politically Connected Firms. *The Characteristics of Politically Connected Firms*, 1-34.

Ferdiawan, Y., & Firmansyah, A. (2017). Pengaruh Political Connection, Foreign Activity, dan Real Earnings Management Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan, 5*(3), 1601-1624.

Frank, M., Lynch, L., & Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*, *84*(2), 467-469.

Gemilang, D. N. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Pada Tahun 2013-2015).* Skripsi pada Institut Agama Islam Negeri Surakarta: tidak diterbitkan.

Hanum, H. R. (2013). *Pengaruh Karakteristik Corporate Governance Terhadap Effective Tax Rate (ETR).* Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.

Kasmir. (2016). *Pengantar Manajemen Keuangan.* Jakarta: PrenadaMedia.

Kementerian Keuangan. (2014). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan* 2013.

Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2015). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan* 2014.

Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2016). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan* 2015.

Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2017). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan* 2016.

Jakarta: Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan. (2018). *Laporan Kinerja Kementerian Keuangan* 2017.

Jakarta: Kementerian Keuangan.

Khurana, I. K., & Moser, W. J. (2009). *Institusional Ownership and Tax Aggressiveness*, Available at SSRN:. Retrieved from https://ssrn.com/abstract=1464106 or http://dx.doi.org/10.2139

Kim, C. F., & Zhang, L. (2016). Corporate Political Connections and Tax Aggressiveness. *Contemporary Accounting Research, 33*(1), 78-114. doi:doi:10.1111/1911-3846.12150

Kurniasari, W. I. (2015). *Pengaruh Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility dan Keberadaan Risk Management Committee Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2013).* Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.

Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 86-108.

Lestari, G. A., & Putri, I. A. (2017). Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 18*(3).

Leuz, C., & Gee, F. O. (2006). Political Relationships, Global Financing,And Corporate Transparency: Evidence From Indonesia. *Journal of Financial Economies, 81*(2), 411-439.

Muzakki, M. R., & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Dipenogoro Journal of Accounting, 4*(3), 1-8.

Noor, R. M., Fadzillah, N. S., & Mastuki, N. (2010). Corporate Tax Planning: A Study On Corporate Effective Tax Rates of Malaysian Listed Companies. *International Journal of Trade, Economics and Finance, 1*(2), 189-193.

Novitasari, S. (2016). Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance, dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode Tahun 2010-2014). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4*(1), 1901-1914.

Pradnyadari, I. D. (2015). *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013).* Skripsi. Semarang: tidak diterbitkan.

Pratiwi, N., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Pada Perusahaan yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia yang Memiliki Skor Corporate Governance Perception Index (CGPI) Selama Peri. *e-Proceeding of Management, 2*(3), 3146-3152.

Purwanti, S. M., & Sugiyarti, L. (2017). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 5*(3), 1625-1642. Diambil kembali dari https://doi.org/10.17509/jrak.v5i3.9225

Purwoto, L. (2011). Pengaruh Koneksi Politis, Kepemilikan Pemerintah dan Keburaman Laporan Keuangan terhadap Kesinkronan dan Risiko Crash Harga Saham. *Ringkasan Disertasi Program Doktor Ilmu Ekonomi Manajemen*.

Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The impact of board of director oversight characteristics on corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy, 32*(3), 68-88.

Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak.* Jakarta: Salemba Empat.

Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises and Tax Avoidance : an Evidence From Indonesia. *Corporate Ownership and Control*, 13(3), 1–6.

Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Weston, J. F., & Copeland, T. E. (2011). *Manajemen Keuangan Jiid 2.* Jakarta: Salemba Empat.

<https://nusantara.news>, diakses pada tanggal 24 September 2018

<https://pajak.go.id>, diakses pada tanggal 26 September 2018

<https://www.cnnindonesia.com>, diakses pada tanggal 26 September 2018

https://www.merdeka.com, diakses pada tanggal 26 September 2018

<https://nasional.kompas.com>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018